
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</p> <p style="text-align: center;">Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah</p>	Nomor SOP	OT.01.02-017-053.De.1
	Tanggal Pembuatan	Selasa, 24 Oktober 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</p>  <p style="text-align: center;">Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001</p>
Judul SOP Mikro	Pelaksanaan FGD/Seminar/FKK di bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) Kendaraan roda dua dan empat Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Disimpan dalam data elektronik dan manual

